



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH HARYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **264669**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.075.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m²/300 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/120 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m²/240 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 825.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOTOR, DAIHATSU SIGRA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 119.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.050.500.000
III. HUTANG	Rp.	941.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.109.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.